

MEMO HUKUM

KEJAHATAN PERS

LILIK ANISAH

**DELIK PERS "PEMBERITAAN DI SURAT KABAR
YANG BERDAMPAK PENCEMARAN NAMA BAIK (KEHORMATAN)"
DITINJAU DARI PASAL 207 KUHP JIS PASAL XIV DAN XV
UU NO. 1/1946**

(Studi Kasus Putusan PN Tangerang No. 36/Pid/PN/TNG/1981 K)



KK.

Pid. 699/96

Ani
d

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

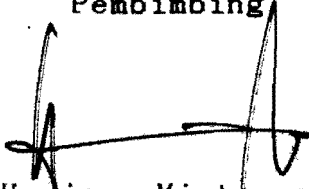
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1995**

**DELIK PERS "PEMBERITAAN DI SURAT KABAR
YANG BERDAMPAK PENCEMARAN NAMA BAIK (KEHORMATAN)"
DITINJAU DARI PASAL 207 KUHP JIS PASAL XIV DAN XV
UU No. 1/1946
(Studi Kasus Putusan PN Tangerang No. 36/Pid/PN/TNG/1981 K)**

MEMO HUKUM


Diajukan sebagai Penulisan Skripsi
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing


H. Harjono Mintaroem, SH, MS

NIP. 130368696

Penyusun


Lilik Anisah

NIM. 039113413

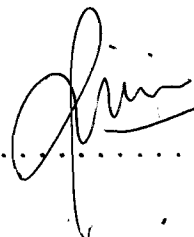
Memo Hukum ini telah diuji pada tanggal 13 Juli 1995.

Panitia penguji :

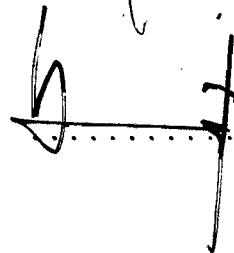
Ketua : Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.



Sekretaris : Sarwirini, S.H., M.S.



Anggota : H.Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pengertian delik pers dapat berbentuk kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers dalam arti sempit, yaitu menyiarkan atau memuat pemberitaan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan di dalam surat-surat kabar atau majalah-majalah. Sedangkan sisten pertanggungjawaban pers diatur dalam pasal 15 UU No. 11/1966 yang menyatakan bahwa pertanggung-jawaban terhadap hukum mengenai sesuatu tulisan dapat dialihkan atau dilimpahkan.

Suatu kasus delik pers tidak selalu menimbulkan pelanggaran hanya terhadap satu ketentuan atau peraturan. Dengan kata lain, sesuatu perbuatan bisa melanggar beberapa ketentuan pidana. Berkait dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili kasus delik pers ini kurang cermat atau kurang jeli akan adanya kemungkinan gabungan perbuatan yang dapat di pidana (*concurus idealis*). Dalam kasus delik pers ini, terdakwa melakukan satu perbuatan yang termasuk dalam beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, Ketentuan pidana yang dilanggar adalah Pasal 207 KUHP, Pasal XIV No. 1/1946 dan pasal XV UU No. 1/1946.

2. Saran.

Untuk memudahkan ada atau tidaknya pemindahan pertanggungjawaban hukum penerbitan pers, seharusnya di dalam undang-undang ditentukan bahwa pemindahan pertanggungjawab hukum tersebut hanya bisa dilakukan secara tertulis. Oleh karena disamping akan memudahkan dalam pembuktian juga akan menjamin adanya kepastian hukum dalam pertanggungjawaban penerbitan pers. Kapan pertanggung-jawaban hukum itu harus dilimpahkan dalam UU tidak dijelaskan, sehingga hakim dapat melakukan penafsiran intensive terhadap Pasal 15 UU No. 11/1966 bahwa dilakukan sebelum tulisan itu dicetak atau dipublikasikan. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian dalam pelimpahan itu sendiri. Dalam menangani suatu kasus, seseorang hakim atau aparat penegak hukum lainnya hendaknya benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagai implementasi dari hukum itu sendiri, tidak hanya melihat dari satu sisi atau masuk akibat yang ditimbulkan oleh suatu permasalahan tersebut.

Berkait dengan fungsi pers sebagai salah satu sarana pembangunan yang tangguh, obyektif dan konstruktif serta menjadi pusat informasi bagi masyarakat, hendaknya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pers diharapkan jeli sehingga benar-benar dapat melaksanakan fungsi pers. Dengan demikian timbulnya delik pers dapat dihindari semaksimal mungkin.